

Pemberdayaan Masyarakat Lingkungan Perumahan melalui Optimalisasi “Jogo Tonggo” dan Gerakan Memakai Masker dalam Upaya Pencegahan Penularan COVID-19 di Kabupaten Semarang

Amni Zarkasyi Rahman¹, Adi Nugroho², Fuad Muhammad³

Program Studi S1 Administrasi Publik, Universitas Diponegoro, Semarang

Program Studi S1 Ilmu Komunikasi, Universitas Diponegoro, Semarang

Program Studi S1 Biologi, Universitas Diponegoro, Semarang

¹amni.rahman@live.undip.ac.id

²adinugroho.semarang@gmail.com

³fuad.muh@gmail.com

Abstrak — Pemberdayaan masyarakat merupakan hal utama yang dilakukan sebagai tindak lanjut dari pandemic COVID-19 yang terjadi di Indonesia. Terlebih terdapat beberapa kebijakan yang secara khas dikeluarkan oleh kepala daerah sebagai Langkah pencegahan penyebaran COVID-19. Salah satu kebijakan tersebut adalah “jogo tonggo” dari Gubernur Jawa Tengah. Kebijakan ini dilakukan untuk memutus rantai penyebaran mulai dari level terkecil yang nantinya akan berdampak lebih luas. Keberhasilan kebijakan “jogo tonggo” ini dipengaruhi oleh sosialisasi dan pemahaman masyarakat tentang bahaya COVID-19 serta upaya yang perlu dilakukan untuk memutus rantai penyebaran melalui penerapan protokol kesehatan. Pemberdayaan masyarakat di perumahan merupakan salah satu kegiatan yang perlu dilakukan untuk mencegah penyebaran di lingkungan perumahan. Hal yang dilakukan adalah dengan optimalisasi “jogo tonggo” dimulai dengan tahap perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan monitoring evaluasi. Rekomendasi agar pemberdayaan masyarakat dalam “jogo tonggo” berdampak maksimal adalah pengorganisasian kegiatan serta proses monitoring evaluasi berkala yang dilakukan setiap bulan. Pelaksanaan dan pelaporan monitoring evaluasi dilakukan dalam kegiatan bulanan di perumahan.

Kata kunci — pemberdayaan, jogo tonggo, monitoring, evaluasi

I. PENDAHULUAN

Pandemik COVID-19 yang melanda Indonesia di tahun 2020 berdampak pada perubahan pola kebiasaan masyarakat. Hal ini terkait dengan adanya protokol kesehatan yang harus dipatuhi dalam keseharian, baik di lingkungan kantor atau di tempat umum. Pemberlakuan protokol Kesehatan secara langsung harus mampu memberikan dampak pada penurunan angka kasus COVID-19 di Indonesia. Hal ini dapat dilihat pada gambar berikut tentang tren kasus positif COVID-19 di Indonesia dalam kurun waktu bulan September yang terus memecahkan rekor kasus baru.

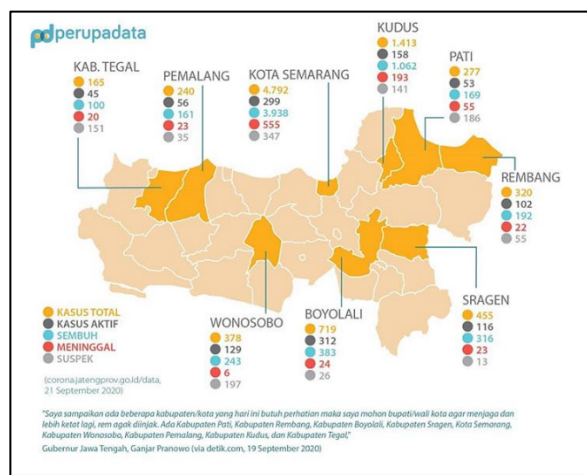
Peningkatan jumlah ini juga diikuti dengan peningkatan jumlah orang yang di tes per hari yang sudah mencapai lebih dari 30 ribu. Lebih banyak 10 ribu dari jumlah orang yang tes di minggu kedua bulan September. Hal ini memberikan indikasi bahwa perlu penegakan kebijakan di tingkat local atau komunitas dalam rangka menekan laju pertambahan jumlah kasus COVID-19.



Gambar 1 Jumlah Kasus Baru COVID-19 di Indonesia
Sumber : covid19.go.id, diolah oleh perupadata
(https://www.instagram.com/p/CFhUDY5g_Ck/)

Sebagai salah satu provinsi yang menjadi perhatian dari pemerintah pusat dalam peningkatan laju jumlah kasus positif COVID-19 adalah Provinsi Jawa Tengah. Meskipun sebelumnya Provinsi Jawa Tengah mampu mencatatkan prestasi dalam penekanan angka kasus melalui kebijakan “Jogo Tonggo”. Oleh sebab itu, diperlukan upaya pemberdayaan masyarakat agar kebijakannya “Jogo Tonggo” tersebut lebih efektif.

Secara lebih rinci, terdapat 9 kota/kabupaten yang masuk dalam kategori merah di Provinsi Jawa Tengah sehingga membutuhkan penanganan lebih lanjut, seperti terlihat pada gambar berikut :



Gambar 2 Sebaran kasus COVID-19 di 9 Kota/ Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah
 Sumber : corona.jatengprov.go.id/data, diolah oleh perupadata
[\(https://www.instagram.com/p/CFZb7cqA_2Y/\)](https://www.instagram.com/p/CFZb7cqA_2Y/)

Berdasarkan data tersebut, diperlukan pola pemberdayaan masyarakat dalam "Jogo Tonggo" pada level terkecil masyarakat, mulai dari keluarga dan lingkungan perumahan. Hal ini disebabkan tidak sedikit masyarakat yang mulai abai dalam penerapan protokol kesehatan.

II. KAJIAN PUSTAKA

A. Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan merupakan bagian dari pengembangan kemampuan agar mampu menjadi mandiri sebagai bagian dari output kegiatan. Lebih lanjut, terdapat 2 cara pandang dalam melihat pemberdayaan, *Pertama*, pemberdayaan dalam konteks posisi masyarakat. Hal yang menjadi perhatian utama adalah posisi masyarakat sebagai subyek kegiatan dalam ruang lingkup partisipasi dalam suatu kegiatan. *Kedua*, pemberdayaan dalam konteks kekuasaan sebagai solusi karena ketidakberdayaan masyarakat. Sehingga diperlukan pionir/ penggerak partisipasi masyarakat yang merupakan bagian dari dalam kelompok masyarakat atau merupakan orang luar. Berdasarkan cara pandang tersebut, proses pemberdayaan sangat bergantung pada: (1) kekuasaan dapat berubah. Jika kekuasaan tidak dapat berubah, pemberdayaan tidak mungkin terjadi dengan cara apapun; dan (2) bahwa kekuasaan dapat diperluas. Hal inilah yang

mendasari pengertian kekuasaan yang dinamis (tidak statis) [1].

Lebih lanjut, diperlukan pengetahuan atas literasi untuk meningkatkan efektifitas dari pemberdayaan yang dilakukan atau disebut dengan *community-based participatory initiative health literacy program*. Hal ini karena program literasi berbasis masyarakat dapat meningkatkan perilaku kesehatan dan pemberdayaan kesehatan dalam waktu singkat [2].

Terkait dengan pemberdayaan masyarakat dalam tata kelola resiko bencana, diperlukan juga peran perempuan yang signifikan. Hal ini terkait dengan sifat pekerjaan perempuan dalam tatanan keluarga dan lingkungan perumahan [3].

B. Monitoring dan Evaluasi dalam Pemberdayaan Masyarakat

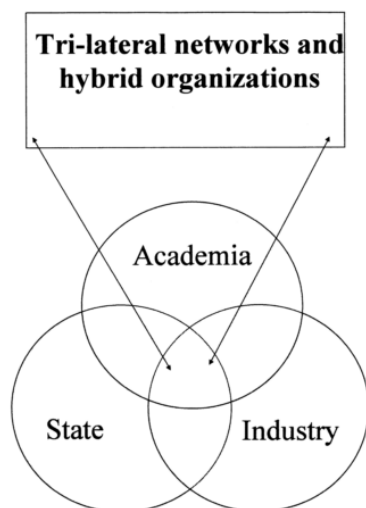
Monitoring dan evaluasi merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan dari pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat. Hal inilah yang menjadi bagian umpan balik kegiatan dalam peningkatan efektifitas dimasa mendatang. Apabila kita lihat beberapa artikel terkait evaluasi berbasis komunitas, maka didapatkan 2 tujuan, yaitu untuk menentukan nilai program dan untuk menyediakan data formatif bagi evolusi program, mengarah pada tantangan etika dan praktis tertentu bagi para evaluator partisipatif [4].

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi ini tentunya perlu disandingkan dalam kegiatan Pengarusutamaan Pengurangan Resiko Bencana [5]. Hal yang dimaksud adalah monitoring dan evaluasi pemberdayaan masyarakat juga turut melihat adanya pengarusutamaan penanggulangan bencana non alam (pandemik COVID-19). Sesuai dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, diketahui bahwa peran masyarakat sangat penting dalam upaya penanggulangan bencana. Oleh karena itu, pola pemberdayaan masyarakat ideal berdasarkan literatur yang ada adalah pemberdayaan masyarakat berbasis komunitas dengan efektifitas monitoring dan evaluasi.

III. PEMBAHASAN

A. Pengabdian kepada Masyarakat sebagai bagian dari Kolaborasi

Pengabdian kepada masyarakat merupakan bagian dari Tri Dharma Perguruan Tinggi yang wajib dilaksanakan dan mampu memberikan dampak positif pada masyarakat. Agar memberikan dampak lebih signifikan dalam pemberdayaan masyarakat, diperlukan kolaborasi antara pemerintah dan industri sehingga terbentuk pola hubungan triple helix antara universitas-pemerintah-industri [6, 7].



Gambar 3 The Triple Helix Model of University-Industry-Government Relation [6]

Terkait dengan upaya menekan laju pertumbuhan angka positif COVID-19 di Provinsi Jawa Tengah, diperlukan upaya pemberdayaan masyarakat yang melibatkan peran universitas dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Tentunya kolaborasi ini akan meningkatkan probabilitas keberhasilan pemahaman masyarakat akan upaya proteksi diri dalam keseharian mereka di era adaptasi kebiasaan baru [8].

Hal yang dilakukan adalah sosialisasi pemberian pemahaman tentang protokol kesehatan yang harus diterapkan, baik di lingkungan rumah atau lingkungan kantor serta penguatan joko tonggo melalui pembuatan portal perumahan.

a. Sosialisasi Langsung

Bentuk sosialisasi yang dilakukan melalui 2 cara, secara langsung maupun tidak langsung. Cara sosialisasi secara langsung dilakukan pada forum bulanan RT melalui penetapan wilayah wajib menggunakan masker. Hal ini turut dipertegas dengan adanya spanduk yang dipasang di pintu masuk perumahan. Spanduk ini sebagai peringatan dan pengingat warga untuk selalu menggunakan masker.



Gambar 4 Spanduk Kawasan Wajib Menggunakan Masker di Perumahan
Sumber : Dokumentasi 2020

Selain itu, dilakukan kegiatan pembagian masker sesuai dengan jumlah anggota keluarga sekaligus diberikan ajakan secara langsung untuk selalu menggunakan masker jika akan meninggalkan rumah.



Gambar 5 Pembagian Masker kepada Warga Perumahan secara bertahap
Sumber : Dokumentasi 2020

Selain itu, sosialisasi secara tidak langsung dilakukan melalui komunikasi dalam grup whatsapp perumahan. Bentuk komunikasi yang disampaikan adalah berbagai informasi tentang perlunya menjaga protokol kesehatan, tata cara memasuki rumah setelah pulang dari kantor, serta berbagai berita tentang perkembangan kasus COVID-19 di Indonesia.

Dampak dari sosialisasi yang dilakukan adalah warga perumahan secara perlahan memahami tentang pentingnya menjaga diri dari potensi tertular COVID-19. Hal ini dilihat dari beberapa warga yang saling mengingatkan jika terdapat warga lain yang beraktifitas di lingkungan perumahan tanpa menggunakan masker. Lebih lanjut, pemahaman warga turut memberikan dampak dalam menekan angka penyebaran COVID-19 di lingkungan perumahan, dengan tidak adanya kasus positif di lingkungan perumahan x di Kabupaten Semarang sejak pertama kali kasus positif diumumkan di Indonesia (2 maret 2020). Hal inilah yang perlu direplikasi di lingkungan perumahan pada daerah lain dalam kerangka “joko tonggo” atau dalam Bahasa Indonesia berarti jaga tetangga.

b. Penguatan Jogo Tonggo melalui Pembuatan Portal

Inti dari pelaksanaan jogo tonggo adalah saling menjaga dalam penerapan protokol Kesehatan, termasuk di dalam kegiatan tersebut adalah menjaga keamanan dan kenyamanan lingkungan perumahan dari tamu/ orang luar yang dimungkinkan menjadi sumber penyebaran COVID-19. Hal ini disebabkan maraknya kasus positif COVID-19 yang merupakan OTG (Orang Tanpa Gejala). Oleh sebab itu, kegiatan pengabdian yang dilakukan adalah pembuatan portal secara gotong royong untuk membatasi akses keluar masuk di lingkungan perumahan.



Gambar 6 Gotong Royong Warga Perumahan membangun portal

Sumber : Dokumentasi 2020

Melalui portal yang dibuat, semakin mempermudah dalam monitoring pergerakan warga di lingkungan perumahan. Portal juga efektif dalam memantau mobilitas buruh bangunan karena masih banyak rumah yang masih dalam proses pembangunan.

Selain itu, portal juga turut mempermudah pendataan warga yang keluar masuk perumahan, terutama pada jam malam sehingga pengarusutamaan pengurangan resiko bencana dapat dilaksanakan secara efektif.

B. *Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan “Jogo Tonggo”*

Keberhasilan dari pemberdayaan masyarakat yang dilakukan tidak lepas dari pelaksanaan monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh penggerak. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara sederhana dilakukan dengan mengisi buku catatan data keluar masuk warga. Sebagai contoh adalah warga memberitahukan aktifitas pekerjaan serta kegiatan incidental warga (warga yang keluar kota). Melalui buku catatan ini, sesama warga akan saling menjaga dan saling membatasi diri dalam berinteraksi, bukan dalam maksud menghindari tetapi dalam menjalankan protokol Kesehatan.

Pernah kejadian terdapat warga yang kurang enak badan, maka kami menyampaikan kepada warga tersebut untuk tetap berada di rumah dan mengurangi kegiatan aktifitas di luar. Melalui komunikasi persuasif yang dilakukan, terlebih oleh orang yang telah berada dalam satu lingkungan yang sama dalam kurun waktu lama, maka probabilitas keberhasilan “penyadaran” warga akan lebih baik. Selain itu, dalam rapat RT juga disampaikan hasil-hasil dari pelaksanaan kegiatan “jogo tonggo” secara umum, seperti aktifitas tutup portal atau lapor ketua RT jika terdapat warga luar yang datang berkunjung.

Keberhasilan ini juga didukung oleh pengorganisasian yang efektif dalam program ini di tingkat RT melalui organisasi yang telah terbentuk sebelumnya. Sebagai contoh adalah seksi keamanan yang bertugas memantau aktifitas warga. Efektifitas organisasi perumahan ini juga turut didukung dengan kegiatan PKK yang juga dilakukan secara rutin. Sehingga upaya sosialisasi tidak hanya dilakukan oleh bapak-bapak, namun juga kepada ibu-ibu di lingkungan perumahan.

IV. PENUTUP

Pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu kunci kesuksesan dalam penerapan “jogo tonggo” di lingkungan perumahan. Pemberdayaan masyarakat yang dilakukan akan dimulai dengan sosialisasi dan pemberian pemahaman tentang bahaya COVID-19. Agar pelaksanaan pemberdayaan masyarakat lebih efektif dimasa mendatang, diperlukan kegiatan monitoring dan evaluasi atas kegiatan yang dilakukan. Hal ini dapat dilakukan dengan cara sederhana yaitu menggunakan buku catatan yang memantau pergerakan mobilitas warga perumahan. Melalui organisasi yang kuat serta partisipasi berbagai pihak dalam upaya menekan angka penyebaran COVID-19, semoga grafik angka positif COVID-19 di Indonesia semakin melandai pada beberapa bulan kedepan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih penulis sampaikan kepada Pusat Pelayanan Kuliah Kerja Nyata (P2KKN) Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Diponegoro yang telah memberikan dana pengabdian kepada masyarakat dalam pelaksanaan KKN Tim 2 Tahun 2020/2021 serta Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang telah memberikan dana pengabdian kepada masyarakat Semester 1 Tahun 2020.

REFERENSI

- [1] E. Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*: PT Refika Aditama.
- [2] S.-C. Lin, I. J. Chen, W.-R. Yu, S.-Y. D. Lee, and T.-I. Tsai, "Effect of a community-based participatory health literacy program on health behaviors and health empowerment among community-dwelling older adults: A quasi-experimental study," *Geriatric Nursing*, vol. 40, pp. 494-501, 2019/09/01/ 2019.
- [3] K. Hemachandra, D. Amaratunga, and R. Haigh, "Factors affecting the women's empowerment in disaster risk governance structure in Sri Lanka," *International Journal of Disaster Risk Reduction*, vol. 51, p. 101779, 2020/12/01/ 2020.
- [4] N. Wallerstein, "Power between evaluator and community: research relationships within New Mexico's healthier communities," *Social Science & Medicine*, vol. 49, pp. 39-53, 1999/07/01/ 1999.
- [5] H. Wahyuni and S. Sakir, "Pengarusutamaan Pengurangan Resiko Bencana (PRB) Di Daerah Rawan Bencana Kabupaten Sleman," *ARISTO*, vol. 9, pp. 131-150, 2020.
- [6] H. Etzkowitz and L. Leydesdorff, "The dynamics of innovation: from National Systems and "Mode 2" to a Triple Helix of university-industry-government relations," *Research Policy*, vol. 29, pp. 109-123, 2000/02/01/ 2000.
- [7] Z. R. Amni and N. Diyah, "Triple Helix in the Poverty Reduction Policy Based on Community Empowerment in Semarang City," in *E3S Web of Conferences*, 2018, p. 10005.
- [8] A. Z. Rahman, F. E. Wahyudi, and W. Widiartanto, "Collaborative Nexus Between University-Industry-Government as an Innovation for Community Development," in *International Conference on Emerging Media, and Social Science*, 2018.